

KK
Per 61/01
Atc
P

SKRIPSI

BRAHMA ASTAGIRI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
DALAM JUAL BELI
PERANGKAT LUNAK KOMPUTER**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

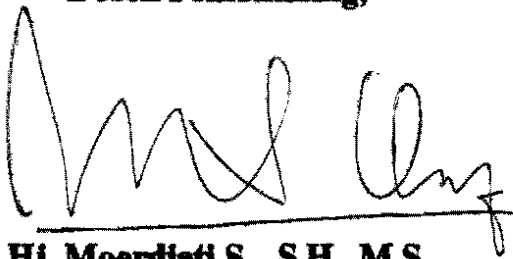
**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
DALAM JUAL BELI
PERANGKAT LUNAK KOMPUTER**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

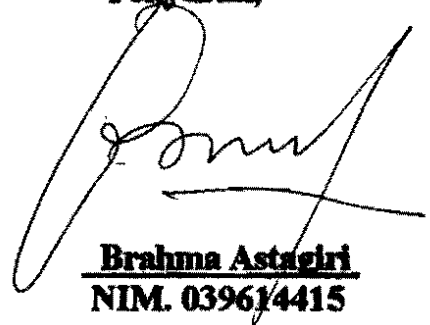


Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

H. Moerdiati S., S.H., M.S.
NIP. 130 287 031

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'B' and a long horizontal stroke.

Brahma Astagiri
NIM. 039614415

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 11 Juli 2001

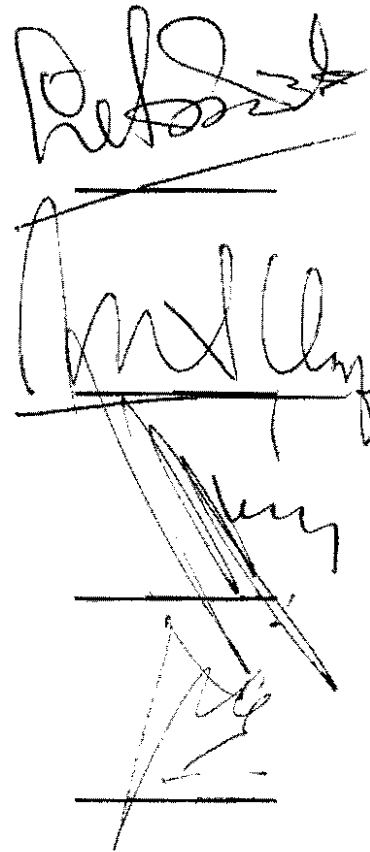
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.

Anggota : 1. Hj. Moerdiati S., S.H. M.S.

2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

3. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV**PENUTUP****1. Kesimpulan**

a. Perkembangan bisnis perdagangan di dunia teknologi informasi, terutama dalam sektor jual beli perangkat lunak komputer dilakukan dengan menggunakan mekanisme perjanjian jual beli antara *Software House* dan konsumen. Dalam praktek, dokumen perjanjian jual beli yang digunakan adalah berupa perjanjian baku yang telah disediakan terlebih dahulu oleh pihak *Software House* sehingga menyebabkan berkurangnya keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Dengan demikian akan sangat mudah terjadi eksploitasi hak-hak konsumen oleh *Software House* sebagai pihak yang kuat, dalam arti pihak yang lebih "expert" di bidang TI.

Sebagai langkah perlindungan hukum dalam suatu perjanjian jual beli perangkat lunak komputer maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengantisipasi kemungkinan adanya klausula-klausula yang merugikan kepentingan konsumen dan wanprestasi dari *Software House*.

b. Upaya hukum bagi konsumen terhadap Software House yang wanprestasi dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu upaya hukum yang dilakukan melalui pengadilan dan upaya hukum yang dilakukan melalui luar pengadilan. Jalur penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ditempuh setelah usaha penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dipilih oleh para pihak tidak bisa menghasilkan kesepakatan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan ke pengadilan oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan pembubaran atau pembatalan perjanjian beserta ganti rugi.

2. Saran

b. Pembuatan dan pencantuman klausula-klausula baku dalam dokumen perjanjian jual beli perangkat lunak komputer seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar tercipta keseimbangan dan kebebasan berkontrak dalam hubungan hak dan kewajiban antara Software House dan Konsumen.

c. Upaya penyelesaian konsumen melalui pengajuan gugatan ke pengadilan sebaiknya dilakukan setelah upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara mufakat telah gagal mencapai kesepakatan. Dengan adanya pengaturan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sekaligus meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.